

DETERMINAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI KOTA LANGSA

Maya Cantika^{a*}, Dewi Rosa Indah^b, Nasrul Kahfi Lubis^c

^{a,b,c}Fakultas Ekonomi, Universitas Samudra

*Email : mayacantika0809@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the determinants of government agency performance accountability. This type of research is quantitative. The population and research sample are all SKPK in Langsa City. The sample was determined based on the saturated sampling technique with 90 respondents. Methods of data collection using a questionnaire. The data analysis method used in this research is multiple linear regression. The results of this study indicate that the Clarity of Budget Targets has a positive and significant effect on the Performance Accountability of Government Agencies, Compliance with Legislation has a positive and significant impact on the Performance Accountability of Government Agencies, Transparency has a positive and significant impact on the Performance Accountability of Government Agencies, Clarity of Budget Targets, Compliance with Regulations, Legislation, and Transparency with a Fsig value of $0.000 < 0.05$ simultaneously affect the Performance Accountability of Government Agencies.

Keywords: Clarity of budget targets, compliance with laws and regulations, transparency, and accountability for the performance of government agencies.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui determinan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif. Populasi dan sampel penelitian yaitu seluruh SKPK di Kota Langsa. Sampel ditentukan berdasarkan teknik sampling jenuh dengan responden sebanyak 90 orang. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Ketaatan Pada Peraturan Perundangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kejelasan Sasaran Anggaran, Ketaatan Pada Peraturan Perundangan, dan Transparansi dengan nilai Fsig $0,000 < 0,05$ secara simultan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Kata Kunci: Kejelasan sasaran anggaran, ketaatan pada peraturan perundangan, transparansi, dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

PENDAHULUAN

Isu tentang kinerja pemerintah daerah dewasa ini menjadi sorotan publik karena belum menampakkan hasil yang baik yang dirasakan oleh rakyat. Rakyat menuntut pemerintahan mempunyai kinerja yang baik dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai perwujudan konsep otonomi daerah. Keadaan negara saat ini sangat memprihatinkan hal ini disebabkan oleh kurang adanya penerapan sistem pemerintahan yang baik, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, bukan saja sistemnya yang belum tertata tetapi krisis multidimensi yang dihadapi oleh negara saat ini (Auditya. 2013). Akuntabilitas kinerja pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik (Riantiarno 2011).

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang penyesuaian sistem kerja aparatur sipil negara dalam upaya pencegahan penyebaran covid-19 dilingkungan instansi pemerintah, pada penelitian ini terdapat beberapa masalah peneliti menyatakan temuan pertama terletak pada dampak covid-19, dimana covid-19 ini terjadi pada pada awal tahun 2020. Dampak covid-19 pada kinerja instansi pemerintah, dimana dengan adanya *pandemic* covid-19 instansi pemerintah di lingkungan Kota Langsa harus melaksanakan kebijakan pemerintah yang menerapkan *Work From Home* bagi para ASN (Aparatur Sipil Negara), tentunya memiliki sejumlah dasar pertimbangan dan acuan dalam pemutusan kebijakannya. Namun banyak faktor yang menghambat kinerja ASN dalam metode kerja ini. Lebih dari 1 bulan peneliti menemukan kendala-kendala seperti sulitnya ASN bertemu secara langsung sebagai makhluk sosial, sehingga menyebabkan kesalahan informasi baik dalam bentuk data maupun prosedur pelaksanaan kerja di setiap instansi. Motivasi untuk melakukan pelayanan terbaik terhadap publik juga masih kurang disadari dan menjadi acuan untuk para ASN. Mereka hanya melakukan tindakan-tindakan yang sebatas memenuhi formalitas dalam bekerja saja dalam kondisi darurat seperti ini, dimana integritas yang tinggi dibutuhkan pada kondisi ini. Selain itu faktor kebosanan dari rutinitas, kondisi dan lingkungan bekerja di rumah juga berpengaruh pada kreatifitas dan semangat kerja para ASN tersebut. Selain dari faktor internal, faktor eksternal juga disinyalir menjadi penghambat kinerja para ASN.

Ketidakadaan atau ketidaklengkapan sarana dan prasarana di rumah untuk menunjang pekerjaan mereka menjadi penghambat kinerja mereka dalam melayani publik secara baik. Tingkat kondusifitas bekerja di rumah juga menjadi unsur penentu efektifitas kerja ASN. Temuan kedua terletak pada ketaatan pada peraturan perundangan dalam laporan audit BPK menyangkut pada pembayaran gaji, tunjangan serta tambahan penghasilan tidak sesuai ketentuan. Alasan dari fenomena karena pemerintah perlu untuk memahami dan mendukung metode *Work For Home* yang dijalani ASN. Peninjauan dari sisi humanis perlu dikaji ulang seperti pemberian *briefing* setiap hari untuk menyemangati dan mengkonsolidasi kinerja para ASN dalam kondisi kerja darurat yang belum disiapkan sebelumnya. Lalu juga penyempurnaan sistem interaksi kerja perlu diperhatikan untuk meminimalisir kesalahan kerja atau informasi.

LANDASAN TEORI

Teori Penetapan Tujuan (*Goal Setting Theory*)

Teori penetapan tujuan atau *goal setting theory* dikemukakan oleh Locke & Latham (1991). Teori ini menjelaskan tentang hubungan antara tujuan yang ditetapkan dengan prestasi kerja (kinerja). *Goal setting theory* menjelaskan bahwa penetapan tujuan yang menantang dan dapat diukur hasilnya akan dapat meningkatkan prestasi kerja (kinerja), yang diikuti dengan memiliki kemampuan dan keterampilan kerja. Tuntutan akuntabilitas atas instansi-instansi publik, pemerintah daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban keberhasilan ataupun kegagalan yang dialami instansi harus dipublikasikan melalui laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang transparan.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Akuntabilitas kinerja pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik (Riantiarno 2011).

Kejelasan Sasaran Anggaran

Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana anggaran tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh pemerintah (Setiawan, 2014).

Kejelasan sasaran anggaran mencakup luasnya tujuan anggaran yang dinyatakan secara spesifik dan jelas sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai instansi pemerintah serta mudah di pahami oleh siapa saja yang bertanggungjawab. Pada konteks pemerintah daerah, kejelasan sasaran anggaran berimplikasi pada aparat, untuk menyusun anggaran sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai instansi pemerintah.

Ketaatan Pada Peraturan Perundangan

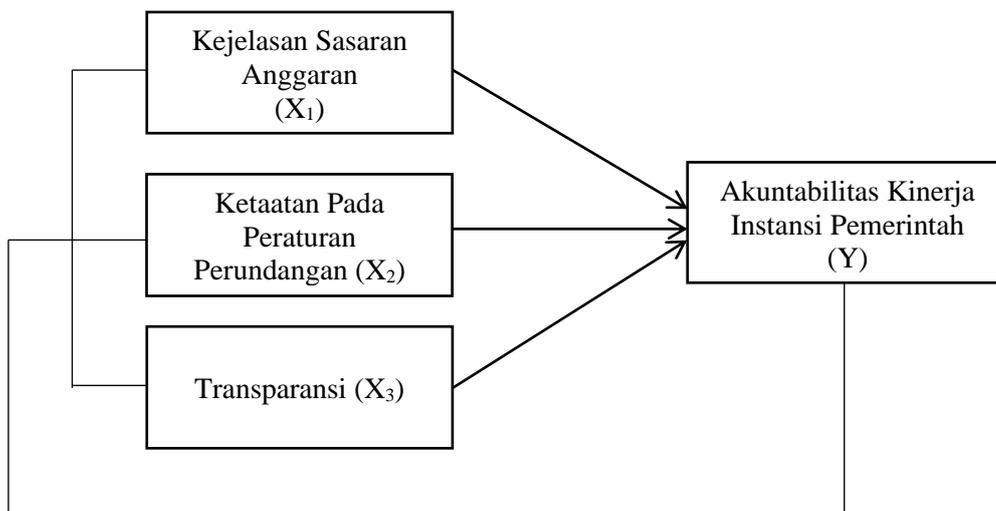
Ketaatan pada peraturan perundangan ketaatan merupakan kewajiban. Sebab, Ketaatan pada peraturan perundangan adalah kepatuhan seseorang dalam menaati peraturan yang telah dibentuk oleh lembaga negara agar dapat mengatur dan menertibkan setiap Organisasi/instansi pemerintah.

Transparansi

Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas, seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat di mengerti dan di pantau (Annisaningrum, 2010).

Model Penelitian

Adapun Model dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1 : Model Penelitian

Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, peneliti ini menguji Determinan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kota Langsa, maka dapat dibuat hipotesis sebagai berikut:

- H₁ :Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- H₂ :Ketaatan pada peraturan perundangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- H₃ :Transparansi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- H₄ :Kejelasan sasaran anggaran, ketaatan pada peraturan perundangan, dan transparansi berpengaruh signifikan secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel depeden yaitu akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

METODE PENELITIAN

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif, kuantitatif adalah salah satu metode penelitian dengan pengumpulan data berupa angka. Adapun Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung (Triyono, 2013).

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh SKPK di Kota Langsa sebanyak 30 SKPK. Selanjutnya Sampel yang digunakan penulis dalam penelitian adalah teknik *sampling* jenuh atau sensus, artinya semua populasi dijadikan sampel. Sedangkan yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), Kepala Sub Bagian Keuangan dan Kepala Sub Bagian Umum di setiap SKPK sehingga total keseluruhan 90 responden.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas

Hasil uji validitas pada variabel dengan lima item pertanyaan, kejelasan sasaran anggaran, ketaatan pada peraturan perundangan, transparansi dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dengan lima item pertanyaan dinyatakan valid jika nilai korelasi *pearson* berada lebih besar dari 0,30 dengan pertimbangan hasil pengukuran dari SPSS yang menyatakan semua pertanyaan diatas lebih besar dari nilai ditetapkan validitas (>0,30), maka pernyataan-pernyataan kuesioner pada penelitian ini telah valid.

Uji Realibilitas

Uji Realibilitas dapat diketahui bahwa *cronbach alpha* dari semua variabel lebih besar dari (0,60), sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen dari kuesioner yang digunakan untuk menjelaskan variabel kejelasan sasaran anggaran, ketaatan pada peraturan perundangan, transparansi dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yaitu dinyatakan *reliabel* atau dapat dipercaya sebagai alat ukur.

Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 1 : Uji Analisis Regresi Linear Berganda
Coefficients^a

	Model	Unstandardized Coefficients		Standardized	T	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients Beta		
1	(Constant)	.725	2.094		.346	.730
	Kejelasan Sasaran Anggaran	.363	.128	.320	2.827	.006
	Ketaatan Pada Peraturan Perundangan	.389	.099	.383	3.946	.000
	Transparansi	.213	.104	.205	2.054	.043

a. Dependent Variable: AKIP

Sumber: Data primer, diolah (2021)

Berdasarkan tabel 4.10 diatas dapat dianalisis estimasi sebagai berikut :

$$Y = 0,725 + 0,363 X_1 + 0,389 X_2 + 0,213 X_3$$

Dari persamaan diatas dapat dijelaskan bahwa :

1. Nilai konstanta 0,725 mengindikasikan bahwa jika variabel kejelasan sasaran anggaran, ketaatan pada peraturan perundangan, transparansi adalah nol maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan terjadi sebesar 0,725.
2. Koefisien regresi variabel kejelasan sasaran anggaran (X_1) sebesar 0,363 mengindikasikan bahwa kejelasan sasaran anggaran meningkat maka juga akan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 0,363.
3. Koefisien regresi variabel ketaatan pada peraturan perundangan (X_2) sebesar 0,389 mengindikasikan bahwa ketaatan pada peraturan perundangan meningkat maka juga akan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebesar 0,389.
4. Koefisien regresi variabel transparansi (X_3) sebesar 0,213 mengindikasikan bahwa transparansi meningkat maka juga akan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebesar 0,213.

Uji Hipotesis

Hasil Uji T (Uji Parsial)

**Tabel 2 : Uji t (Uji Parsial)
Coefficients^a**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.725	2.094		.346	.730
Kejelasan Sasaran Anggaran	.363	.128	.320	2.827	.006
Ketaatan Pada Peraturan Perundangan	.389	.099	.383	3.946	.000
Transparansi	.213	.104	.205	2.054	.043

a. Dependent Variable: AKIP

Sumber: Data primer, diolah (2021)

1. Variabel kejelasan sasaran anggaran memiliki t hitung sebesar 2,827 dengan signifikansi sebesar 0,006. Karena nilai signifikansi < α (0,05) maka dapat dinyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sehingga hipotesis ke-1 diterima dan terbukti kebenarannya.
2. Variabel ketaatan pada peraturan perundangan memiliki t hitung sebesar 3,946 dengan signifikansi sebesar 0,000. Karena nilai signifikansi < α (0,05) maka dapat dinyatakan bahwa ketaatan pada peraturan perundangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sehingga hipotesis ke-2 diterima dan terbukti kebenarannya.
3. Variabel transparansi memiliki t hitung sebesar 2,054 dengan signifikansi 0,043. Karena nilai signifikansi < α (0,05) maka dapat dinyatakan bahwa transparansi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sehingga hipotesis ke-3 diterima dan terbukti kebenarannya.
- 4.

Hasil Uji F (Simultan)

**Tabel 3: Hasil Uji F (Simultan)
Anova^a**

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	365.316	3	121.772	65.423	.000 ^b
Residual	160.073	86	1.861		
Total	525.389	89			

a. Dependent Variable: AKIP

b. Predictors: (Constant), KSA, KPPP, TRS

Sumber: Data primer, diolah (2021)

Dari tabel 4.12 dapat diketahui F sig. sebesar 0,000. oleh karena itu nilai F sig. <0,05 (0,000<0.05) maka dapat dinyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran, ketaatan pada

peraturan perundangan dan transparansi berpengaruh signifikan secara simultan atau bersama-sama terhadap akuntabilitas instansi kinerja pemerintah.

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Tabel 4 : Hasil uji koefisien determinan Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.834 ^a	.695	.685	1.364

a. Predictors: (Constant), KSA, KPPP, TRS

b. Dependent Variable: AKIP

Sumber: Data primer, diolah (2021)

Hasil uji koefisien determinan diatas berdasarkan *Adjust R Square* sebesar 0,685 hal ini berarti menunjukkan bahwa variabel independen pada penelitian ini yaitu kejelasan sasaran anggaran, ketaatan pada peraturan perundangan dan transparansi memberikan kontribusi atau pengaruh sebesar 68,5% terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kota Langsa. Sedangkan sisanya 31,5% (100% - 68,5%) dijelaskan oleh variabel-variabel diluar model.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa Kejelasan sasaran anggaran, Ketaatan pada peraturan perundangan, dan transparansi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah., baik secara parsial maupun simultan.

REFERENSI

- aceh.bpk.go.id. Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Langsa TA 2018. 7 November 2020, (<https://aceh.bpk.go.id/opini-bpk-atas-lkpd-kota-langsa-ta-2018/>)
- Ahyaruddin, Muhammad dan Muhammad Faisal Amrillah, 2018, Faktor Penentu Kinerja Pemerintah Daerah, **Jurnal Akuntansi Multiparadigma Jamal** Vol.9 No. 3; 471-468.
- Ardiyanti, Rika, 2019, Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Pada Desa Woro Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang, Skripsi, Program Studi Akuntansi Syari'ah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Sarjana, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang.
- Ayu, Chintia Tamara dan Yunus Tete Konde, 2016, Pengaruh Akuntabilitas Publik Dan Transparansi Publik Terhadap Mekanisme Pengelolaan Keuangan, **Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman**, Vol. 1 (1), 1-11.
- Cahyani, Ni Made Mega. dan Utama, I. M. K. 2015, Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan Pada Akuntabilitas Kinerja. **E-Jurnal Akuntansi**.

- Elkha, Fatimah dan Wahidahwati, 2020, Pengaruh Pengendalian Internal, Akuntabilitas, dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah, **Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi** : Vol. 9, No. 3: 1-19.
- Ella, 2019, Pengaruh Partisipasi Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo. (Studi Empiris Pada OPD Kabupaten Purworejo)
- Fitrawati, Abdul Kahar dan Muh. Iqbal A, 2017, Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Kinerja Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Survei Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (Skpd) Kabupaten Parigi Moutong), **E-Jurnal Katalogis**, Vol. 5 No. 12; 177-184.
- Ghozali, 2016, Aplikasi Analisis Multivariate Dengan SPSS, Cetakan Keempat, BP Universitas Diponegoro. Semarang.
- Indah, Dewi Rosa, Syukriy Abdullah, Afrah Junita, Heru Fahlevi, dan Puti Andiny 2017, Kajian Kepatuhan Pemerintah Daerah Atas Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Di Aceh (Studi Kasus Pada Dinas Kesehatan), **Jurnal Manajemen Dan Keuangan**, Vol.6, No.1; 627-637.
- Kanji, Lusiana, 2016, Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Kinerja Manajerial dan Pelaporan/Pertanggungjawaban Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang, **Jurnal Imiah Bongaya (Manajemen & Akuntansi)**, No.Xix; 73-92.
- Laksana, Agung Puja dan Bestari Dwi Handayani, 2014, Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengawasan Fungsional, dan Pelaporan Kinerja Terhadap Akuntabilitas Publik Di Kabupaten Batang, **Accounting Analysis Journal**, Vol. 3 No. 2; 177-186.
- Lestari, Fitri, 2015, Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Kinerja Manajerial, Pelaporan/Pertanggungjawaban Anggaran, Transparansi Publik dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Pada Pemerintah Kabupaten Lingga), Skripsi, Program Studi Akuntansi, Sarjana, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Kepulauan Riau.
- Lubis, Nasrul Kahfi, 2017, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Transparansi Pelaporan Keuangan dan Pengaruhnya Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan, **Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (Jensi)**, Vol. 1 No 2; 124-136.
- Lussiana, Titik Mildawati, Fidiana, 2019, Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Anggaran Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi melalui Integrasi Sistem Informasi Keuangan, **Jurnal Riset dan Aplikasi: Akuntansi dan Manajemen**, Vol. 4, No. 1; 1 – 10
- Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Setiawan, Eko, 2013, Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, 1-14.
- Shalekha, Lifiatus, 2020, Determinan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Studi Pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Surabaya), **Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi** , Vol. 9, No. 3; 1-23.
- Sugiyono. 2015, Sugiyono, Metode Penelitian dan Pengembangan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D, (Bandung : Alfabeta, 2015). 407 1. *Metode dan Pengembangan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D.*

- Perwirasari, Fajar Bayu Putri, 2016, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Akip), Skripsi, Program Studi Akuntansi, Sarjana, Universitas Negeri Semarang, Semarang.
- Ulufiah, Weny, 2017, Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Terhadap Pengelolaan Dana Desa Untuk Mewujudkan Good Governance Pada Desa Di Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat, Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah, Palembang.
- Yani, Fitri, 2017, Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir, Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah, Palembang.